



BADAN PUSAT STATISTIK

**PELATIHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL 2024**

Domain 5 STATISTIK NASIONAL

3 ASPEK, 7 INDIKATOR

Tim Pelaksana EPSS



**EVALUASI
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL**



• DOMAIN •

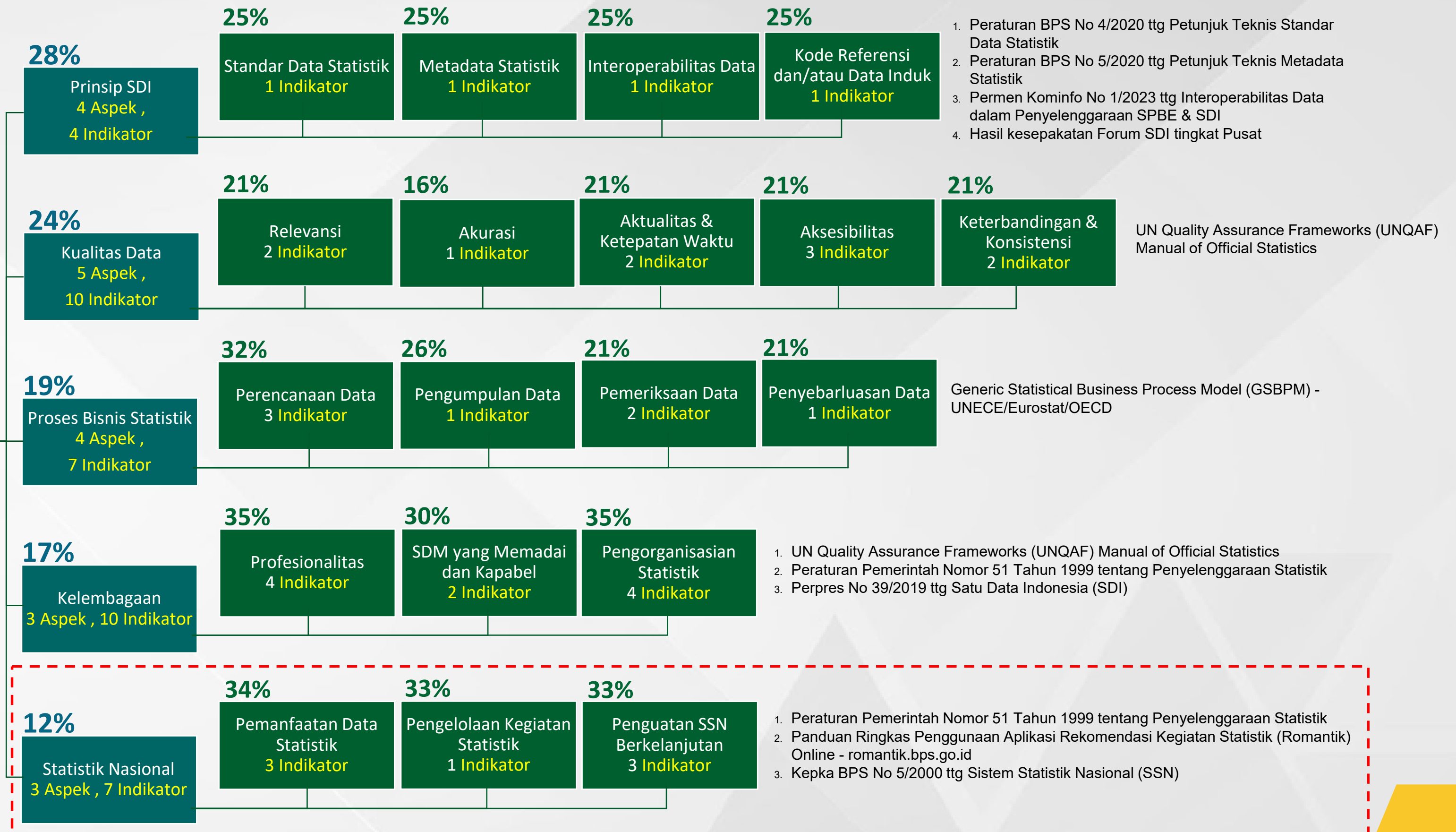
• ASPEK & INDIKATOR •

Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	★ Transparansi Informasi	★ Netralitas dan Objektivitas	★ Kualitas Data	★ Konfidensialitas Data	★ SDM Statistik	★ SDM Manajemen Data	★ Kolaborasi Kegiatan Statistik	★ Forum SDI	★ Kolaborasi Pembina Statistik	★ Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	★ Penggunaan Statistik Dasar	★ Penggunaan Statistik Sektoral	★ Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			★ Perencanaan Pembangunan Statistik	★ Penyebarluasan Data	★ Pemanfaatan <i>Big Data</i>	

★ Indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

100%

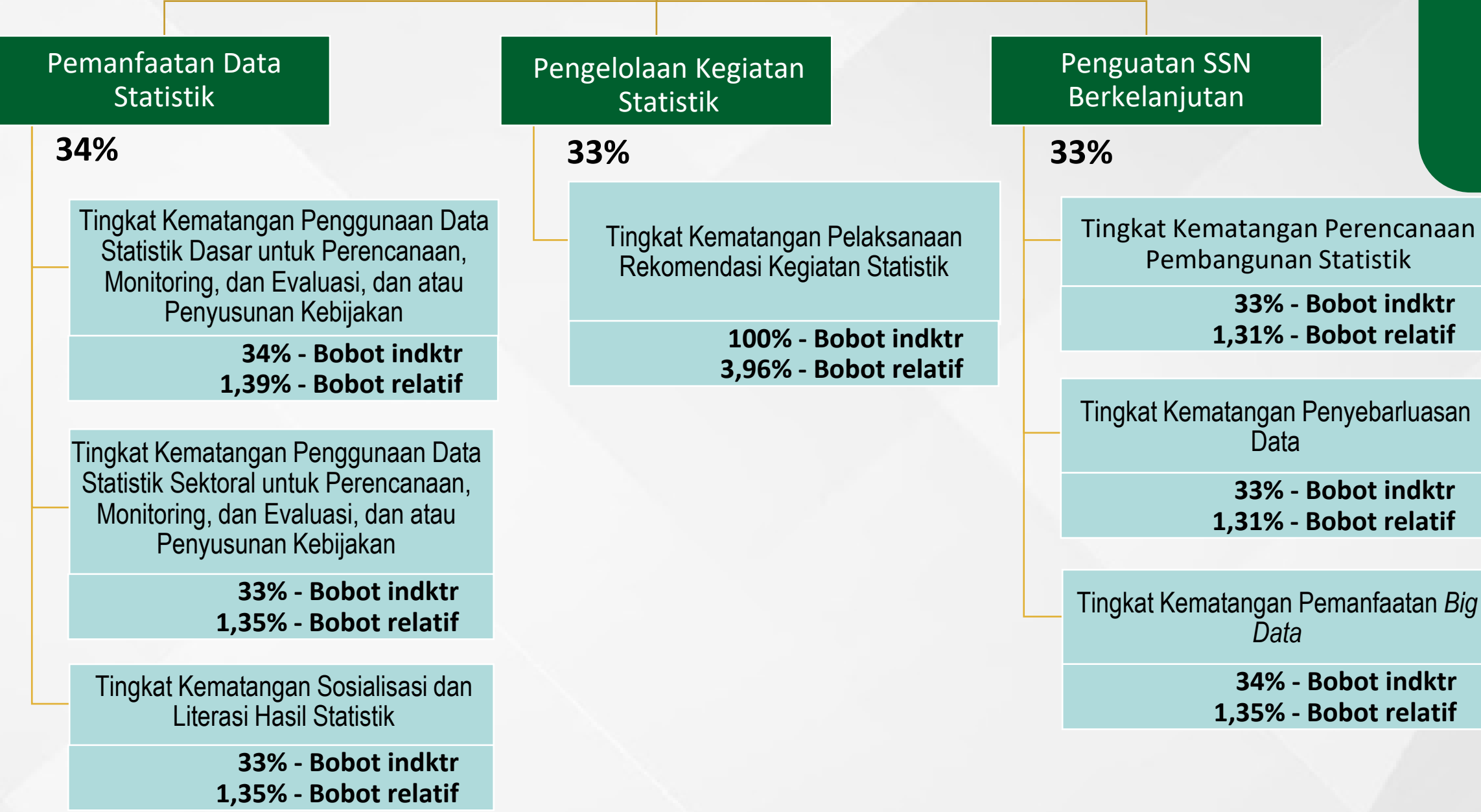
**INDEKS
PEMBANGUNAN
STATISTIK**
5 Domain, 19 Aspek,
38 Indikator



Pembentuk Domain Statistik Nasional

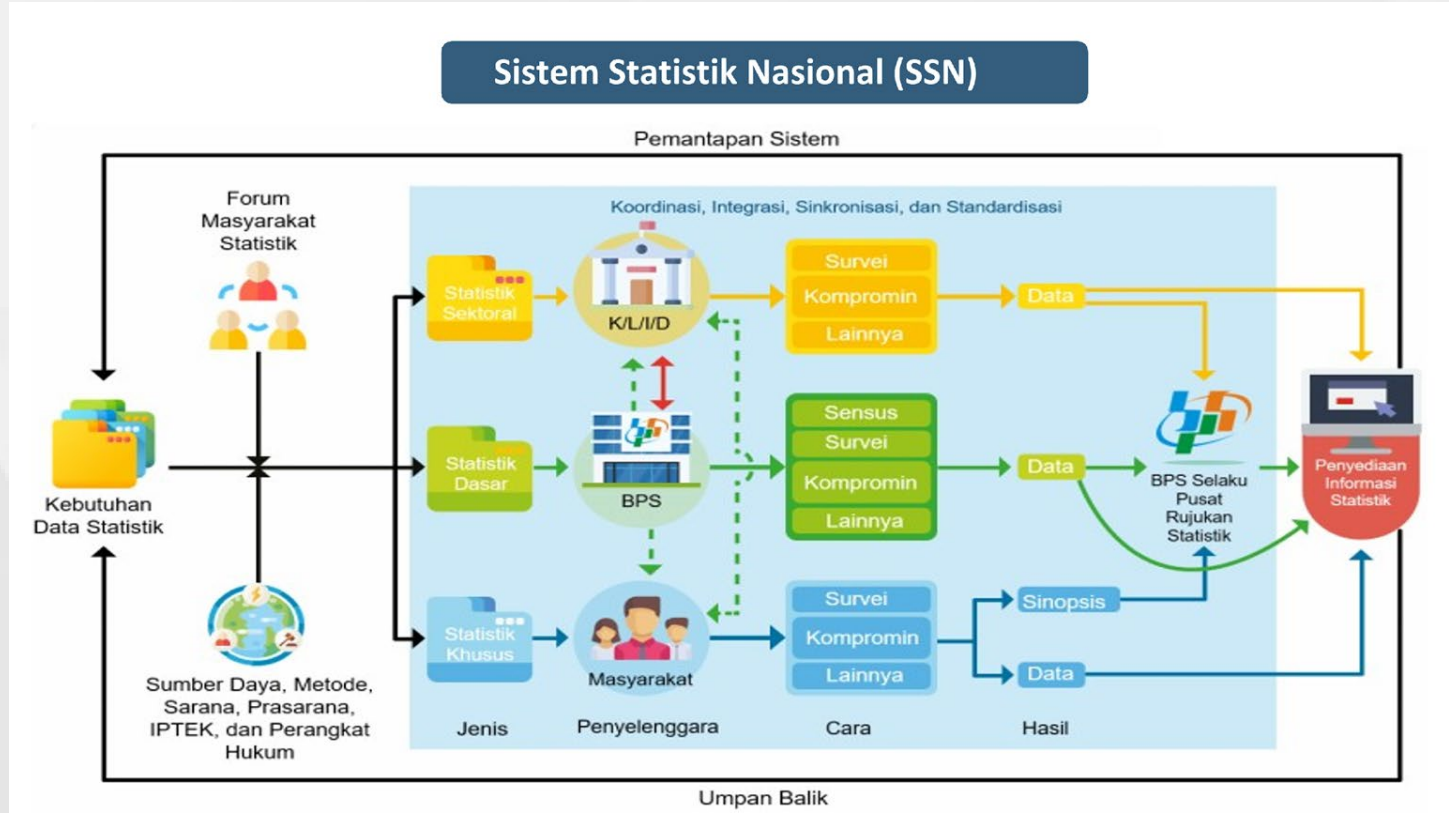
12%

5. Statistik Nasional



Dasar pemilihan indikator di Domain-5 untuk menilai pemenuhan target pelaksanaan Sistem Statistik Nasional oleh para penyelenggara kegiatan statistik baik dasar dan sektoral

Untuk mendapatkan ukuran kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan unsur-unsur SSN



*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek
 *Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)

50101 Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

Statistik dasar adalah statistik yang penyelenggaraannya menjadi **tanggung jawab BPS**.

Statistik Dasar yang sering digunakan oleh K/L/D/I Meliputi:

1. Hasil Sensus BPS (Penduduk, pertanian, dan ekonomi)
2. Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, kemiskinan)

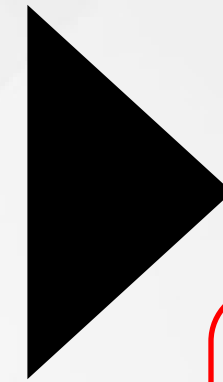
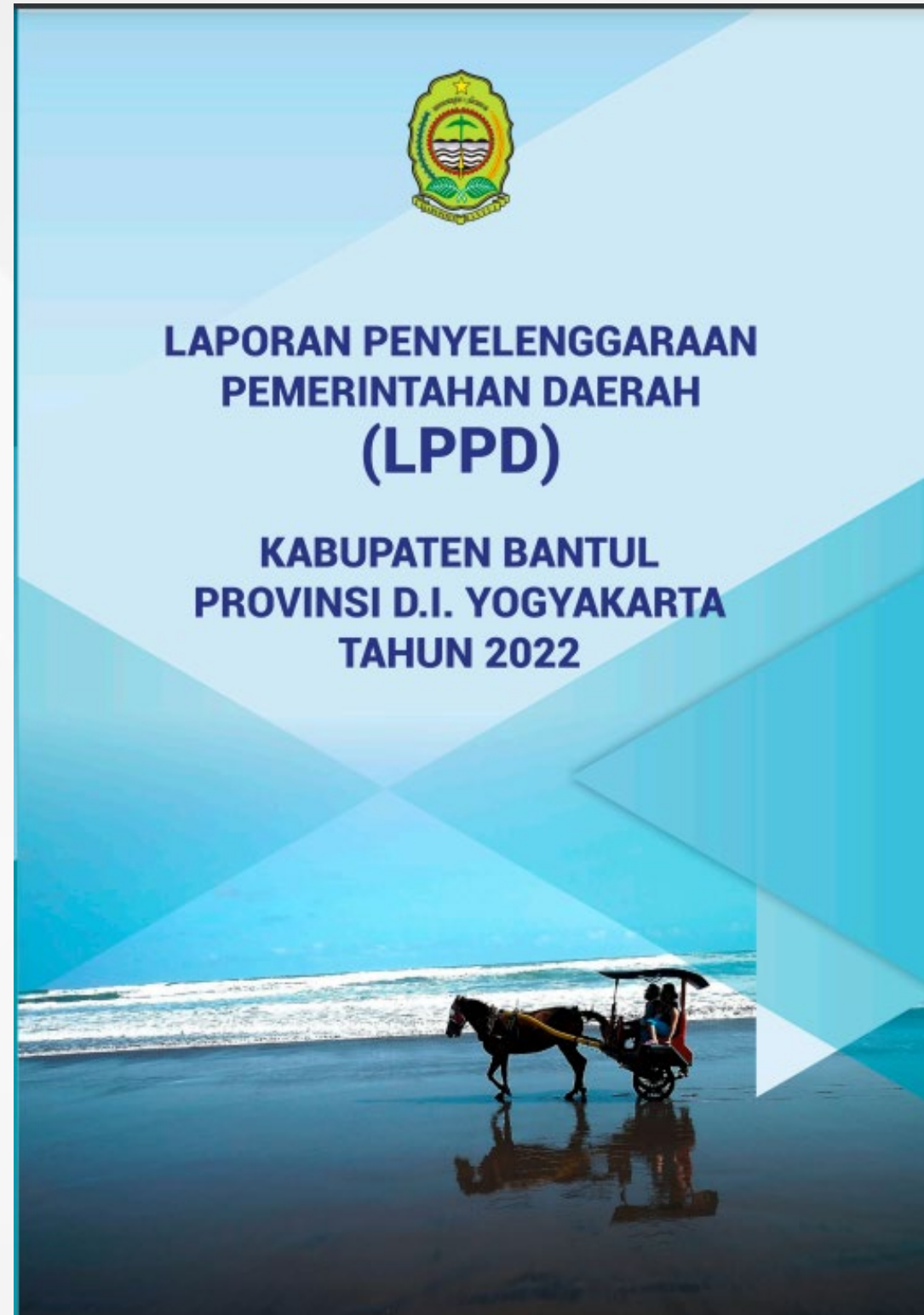
Poin penting dari penggunaan ini bisa digunakan sebagai perencanaan atau evaluasi, atau bahkan monitoring capaian dari suatu K/L/D/I, baik secara parsial (Misal segmentasi penduduk tertentu) maupun menyeluruh.

Domain	5 : Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	1 : Pemanfaatan Data Statistik	50101
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	
Tingkat	Kriteria	
1	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai kepentingannya masing-masing	
3	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata sesuai kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah	
4	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata untuk kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah/Nasional, telah dilakukan koordinasi/konsultasi dengan Pembina Data Statistik, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Contoh "Telah Menggunakan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan", diantaranya:

1. Penggunaan data statistik dasar pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Penggunaan data statistik dasar untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah

Contoh Bukti Dukung



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR GRAFIK	XV
1 BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	30
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	148
2 BAB II	177
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	177
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	177
2.1.2. Angka Kemiskinan	182
2.1.3. Angka Pengangguran.....	184
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	186
2.1.5. Pendapatan Per Kapita	189
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio.....	191
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	194
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	194
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	317
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	354
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	361
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	361
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perianjian Kinerja.....	363

50102 Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

Domain	5 : Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	1 : Pemanfaatan Data Statistik	50102
Indikator	2 : Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	
Tingkat	Kriteria	
1	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai kepentingannya masing-masing	
3	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata sesuai kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah	
4	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata untuk kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah/Nasional, telah dilakukan koordinasi/konsultasi/rekomendasi dari Pembina Data Statistik, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi **kebutuhan instansi tertentu** dalam rangka **penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan** yang merupakan **tugas pokok** instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan statistik sektoral yang dimaksudkan bisa meliputi statistik sektoral yang dihasilkan internal maupun eksternal dari K/L/D/I.

Contoh "Telah Menggunakan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan", diantaranya:

1. Penggunaan data statistik sektoral pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Penggunaan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah

Contoh Bukti Dukung

LEVEL 3



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel II-38
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2012					
Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	83,82	18	Banten	74,38
2	Jawa Tengah	82,73	19	Jambi	74,18
3	DI Yogyakarta	81,43	20	Kalimantan Tengah	73,68
4	Sulawesi Selatan	80,82	21	Kep. Bangka Belitung	73,22
5	Gorontalo	80,52	22	Kalimantan Utara	73,02
6	Kalimantan Selatan	80,29	23	Sumatera Utara	72,25
7	Jawa Timur	79,70	24	Aceh	71,63
8	Sumatera Barat	79,55	25	Kalimantan Barat	71,32
9	Sulawesi Utara	78,30	26	Bengkulu	70,32
10	DKI Jakarta	78,01	27	Sumatera Selatan	69,55
11	Lampung	77,96	28	Nusa Tenggara Timur	67,35
12	Jawa Barat	77,79	29	Riau	66,84
13	Kalimantan Timur	77,46	30	Kepulauan Riau	63,26
14	Sulawesi Tenggara	76,64	31	Maluku Utara	59,58
15	Sulawesi Tengah	75,73	32	Maluku	58,70
16	Nusa Tenggara Barat	75,67	33	Papua Barat	46,05
17	Sulawesi Barat	75,49	34	Papua	35,46

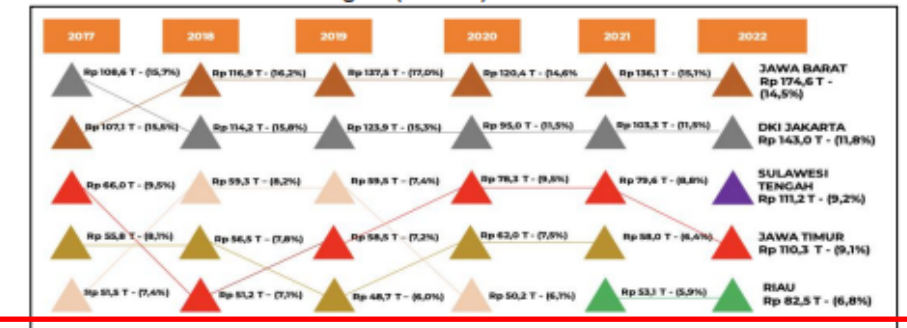
Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan perhitungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,23 persen Namun perhitungan secara nasional belum dirilis oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan jadwal rilis pada umumnya pada semester I tahun berikutnya. Sehingga tahun 2022 nilai IKP Provinsi DKI Jakarta belum terdapat nilai capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Sejak Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah melakukan inovasi dalam rangka membangun komunikasi antara pimpinan dan seluruh pegawai. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual melalui zoom meeting yang dilaksanakan secara periodik setiap hari Sabtu malam. Pelaksanaan kegiatan

peningkatan investasi serta strategi dalam menjaga iklim investasi di tengah kondisi pandemi, realisasi investasi pada 2021 meningkat menjadi Rp. 103,3 triliun dan terus tumbuh hingga Rp. 143,0 triliun pada 2022 (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

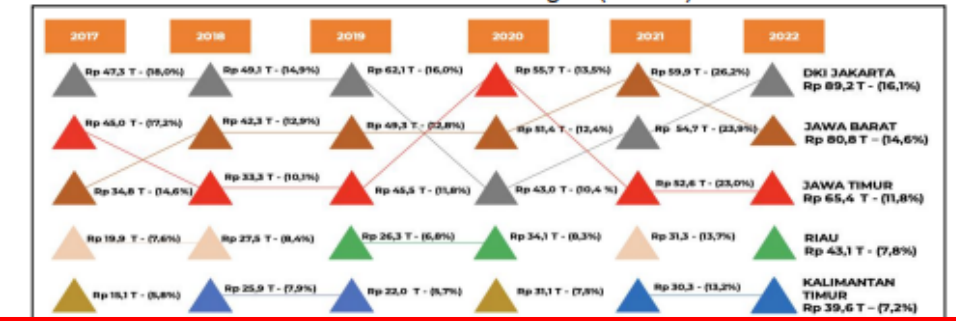
Grafik I-1
Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017-2022 dalam triliun menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati realisasi investasi tertinggi di tingkat Nasional pada tahun 2017 dan menempati posisi kedua sejak tahun 2018-2022 (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Grafik I-2
Tren Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

50103 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Domain	5 : Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	1 : Pemanfaatan Data Statistik	50103
Indikator	3 : Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	
Tingkat	Kriteria	
1	Sosialisasi Data Statistik kepada publik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Sosialisasi Data Statistik kepada publik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	
3	Sosialisasi Data Statistik kepada publik yang telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	
4	Sosialisasi Data Statistik kepada publik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Sosialisasi Data Statistik kepada publik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Kegiatan sosialisasi dan literasi tidak hanya sekadar melakukan diseminasi, namun juga memiliki peran dalam sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan (memberikan intepretasi)

Contoh Cakupan Kegiatan

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media massa dan stakeholder data
2. melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistic (Paling tidak membantu dalam menjelaskan mengenai statistik)
3. Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar

Contoh "Telah Melakukan Sosialisasi Data Statistik kepada publik", diantaranya:

1. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi ketersediaan data-data yang dihasilkan dari kegiatan statistik yang dinilai
2. Kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi terhadap data yang dihasilkan dari kegiatan yang dinilai

Contoh Bukti Dukung

LEVEL 3

BADAN PUSAT STATISTIK **pojok** STATISTIK

WEBINAR CINTA DATA THE SERIES

FILOSOFI SURVEY

Materi: Pengenalan Survei BPS

KAMIS, 11 MEI 2023 08.00 – 10.00 WIB

DAFTAR SEKARANG s.id/cintadata

PEMBICARA
MOH. SAFI'UDIN, SST
Statistisi Pertama Direktorat Diseminasi Statistik

MODERATOR
STEFANIE I. C., SST, M.STAT

FREE CERTIF

SDKI + SUSENAS + SAKERNAS + SPOR - IMPOR + SUPAS + PODES + SDKI + SU

BADAN PUSAT STATISTIK **pojok** STATISTIK

Webinar

#CintaData The Series

Negeri 3 Sensus

Materi: Pengenalan Sensus BPS

Kamis, 6 April 2023 08:30 - 10:00 WIB

Link Registrasi
<https://s.id/cintadata>

Gratis Sertifikat

Pembicara
Stefanie Intan
Christienova SST, M.Stat
Statistisi Muda Direktorat Diseminasi Statistik


Moderator
Dwindi Astuti
Puspaningrum S.Tr.Stat.

ST 2023 SENSUS PERTANIAN

Sensus Penduduk 2020

SENSUS EKONOMI

Sosialisasi dan Literasi Statistik

 BADAN PUSAT STATISTIK DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK FUNGSI LAYANAN DAN PROMOSI STATISTIK	Nomor SOP	SOP-1-09/3230/2021
	Tanggal Pembuatan	10 Mei 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	10 Mei 2021
Disahkan oleh:	Direktur Diseminasi Statistik	
	Dr. Puji Ismartini, M.App.Stat. NIP. 197708151993122002	
	Nama SOP	ESTIMASI (Edukasi Seputar Data dan Informasi Statistik)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);	1. Petugas menguasai teknik <i>Public Speaking</i>	
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);	2. Petugas memiliki wawasan dan pengetahuan terkait produk dan indikator yang dihasilkan oleh BPS	
c. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3. Petugas memiliki wawasan terkait metodologi kegiatan BPS	
d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;	4. Petugas memiliki keterampilan dalam menyajikan data	
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;		
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;		
g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;		
h. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik		
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
	1. Komputer, printer, jaringan internet dan software TI	
	2. Alat komunikasi	
	3. Media publisitas dan Media promosi	

Contoh Dokumen Prosedur Baku yang berlaku untuk seluruh produsen data

50201 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Domain	5	: Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	2	: Pengelolaan Kegiatan Statistik	50201
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	
Tingkat	Kriteria		
1	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS belum dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data		
2	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS telah dilaksanakan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing		
3	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS telah dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan, berlaku untuk seluruh Produsen Data, telah dikoordinasikan oleh Walidata, serta telah menerima rekomendasi dari BPS		
4	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:		
Data Dukung	:		

Salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia). Dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik, BPS terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh K/L/OPD ke BPS, untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi.

Contoh yang perlu untuk dilaporkan meliputi Seluruh Kegiatan Statistik, baik survei maupun kompromin yang:

1. Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
2. Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
3. Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

Contoh " Telah Melaksanakan Pemberitahuan rancangan kegiatan statistic ke BPS dan telah menerima rekomendasi dari BPS", diantaranya:

1. Terdapat pengajuan rekomendasi di romantik online dan telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan BPS
2. Tersedia nomor rekomendasi pada instrumen survei

Contoh Bukti Dukung

LEVEL 3

ROMANTIK Beranda Rekomendasi Terbit Panduan Login

Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	Kompilasi Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Tahun 2023
Cara Pengumpulan Data	Kompromin
Instansi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Bengkulu
Waktu	15 Februari 2023
Identitas Rekomendasi	K-23.1700.002

BLOK I

1.1. Judul:
Kompilasi Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Tahun 2023

1.2. Instansi Penyelenggara:
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Bengkulu

1.3. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:
Jl. Pembangunan No. 12

Provinsi: BENGKULU Kabupaten/Kota: KOTA BENGKULU

BLOK II

Telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS.
Dapat dicek pada: <https://romantik.web.bps.go.id/>



Contoh Dokumen Prosedur Baku yang berlaku
untuk seluruh produsen data

50301 Perencanaan Pembangunan Statistik

*indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

Domain	5	:	Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	3	:	Penguatan SSN Berkelanjutan	50301
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Perencanaan Pembangunan Statistik di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah belum disusun			
2	Perencanaan Pembangunan Statistik di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah disusun dan ditetapkan			
3	Perencanaan Pembangunan Statistik di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan			
4	Perencanaan Pembangunan Statistik di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan reviu serta evaluasi bersama Pembina Data Statistik			
5	Perencanaan Pembangunan Statistik di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5			
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Rencana aksi SDI merupakan turunan dari rekomendasi hasil Forum SDI. Rencana Aksi SDI ini seharusnya diturunkan untuk diterapkan di masing-masing instansi pemerintahan

Cakupan meliputi:

- **Memiliki aturan yang mendasari penyediaan satu data yang berlaku holistic berdasarkan dari hasil forum SDI**

Contoh " Telah Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik", diantaranya:

1. Terdapat rencana aksi Satu Data di lingkungan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah
2. Terdapat rencana kerja penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Contoh Bukti Dukung

LEVEL 2



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 251/KEP/2022
TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022 – 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang No Daerah Istimewa Indonesia Tahun 19 terakhir dengan U tentang Perubahan Tahun 1950 ten Jogjakarta (Lembar Nomor 43, Tambah Nomor 827);

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Daftar Data Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik. Melakukan pengumpulan dan penyajian data spasial. Memastikan data yang tersedia di portal Jogja Dataku dan Geoportal DIY telah sesuai dengan prinsip-prinsip SDI. 												
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Data Statistik Sektor Perencanaan dan Pengendalian Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Data Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan sinkronisasi terhadap daftar data dan metadata antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Koordinasi Penyusunan Daftar Data dengan Kabupaten/Kota 												
		1.1.2. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana Aksi Satu Data	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Kegiatan Tahun 2024 Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana kegiatan 2024. Penyusunan rencana aksi 2024. 												

RENCANA AKSI BPS 2021-2024

RENCANA AKSI STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN STATISTIK INDONESIA

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENYUSUNAN SNPSI YANG DITUANGKAN DALAM REGULASI				
Belum tersedianya dokumen yang memuat strategi nasional pembangunan statistik untuk mewujudkan kegiatan statistik yang terintegrasi antar K/L/D/I menuju Sistem Statistik Nasional yang andal	1. Identifikasi cakupan strategi dalam SNPSI	Teridentifikasi dan ditetapkan strategi yang akan dicakup dalam SNPSI	2021	Tersusunnya dokumen SNPSI yang dituangkan dalam regulasi
	2. Pemetaan pemangku kepentingan SNPSI	Tersedianya pemetaan pemangku kepentingan SNPSI	2021	
	3. Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi	Tersusunnya dokumen SNPSI yang dituangkan dalam regulasi	2021	
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENERAPAN SNPSI				
Belum tersedianya infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pembangunan statistik Indonesia	1. Menyusun daftar kebutuhan infrastruktur SNPSI	Tersusunnya daftar kebutuhan instruktur SNPSI	2022	Tersedianya infrastruktur SNPSI
	2. Melakukan perancangan dan pembangunan infrastruktur SNPSI (termasuk platform yang akan digunakan) sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi	Tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan untuk penerapan SNPSI	2022	

Contoh Rencana Aksi Pembangunan Statistik yang merupakan bagian dari Arah Perubahan BPS 2021-2024

50302 Penyebarluasan Data

*indikator bersifat umum/*general* (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

Domain	5 : Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	3 : Penguatan SSN Berkelanjutan	50302
Indikator	2 : Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	
Tingkat	Kriteria	
1	Penyebarluasan Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penyebarluasan Data dilakukan oleh setiap Produsen Data untuk kepentingan masing-masing	
3	Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh Walidata untuk kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah	
4	Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh Walidata melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan/atau Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penyebarluasan Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Penyebarluasan diharapkan dilakukan dalam medium universal (Dimana dalam hal ini ditekankan untuk penggunaan portal SDI). Hal ini adalah bentuk respon dalam menciptakan ekosistem statistik nasional yang komprehensif

Cakupan :

- Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia.
- Memiliki satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
- Dilakukan satu pintu oleh walidata.

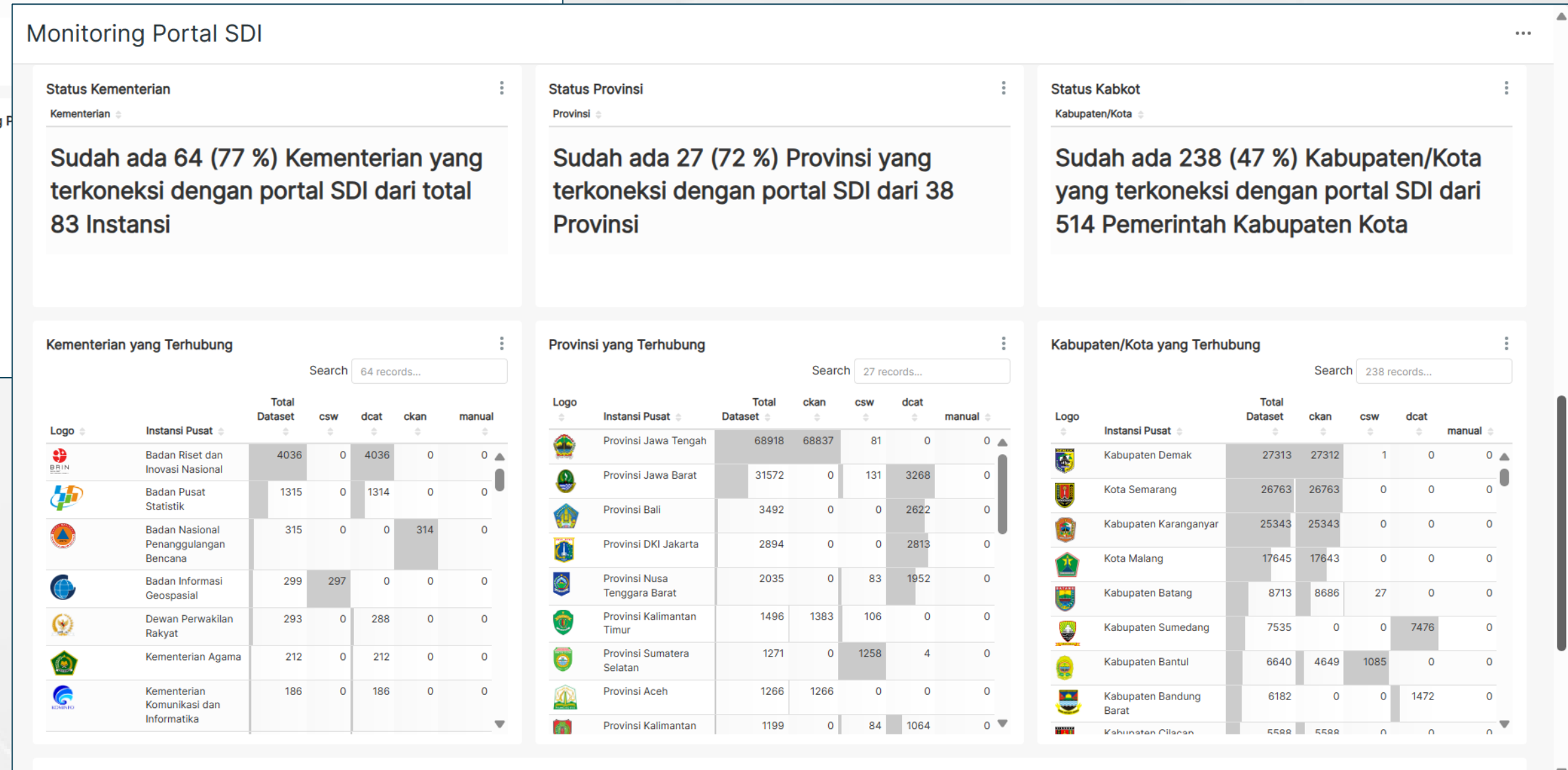
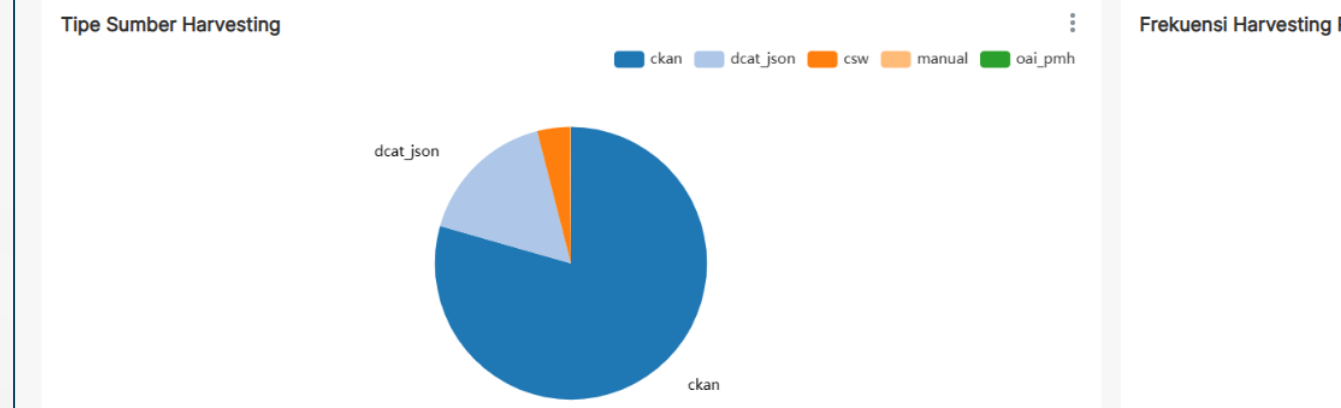
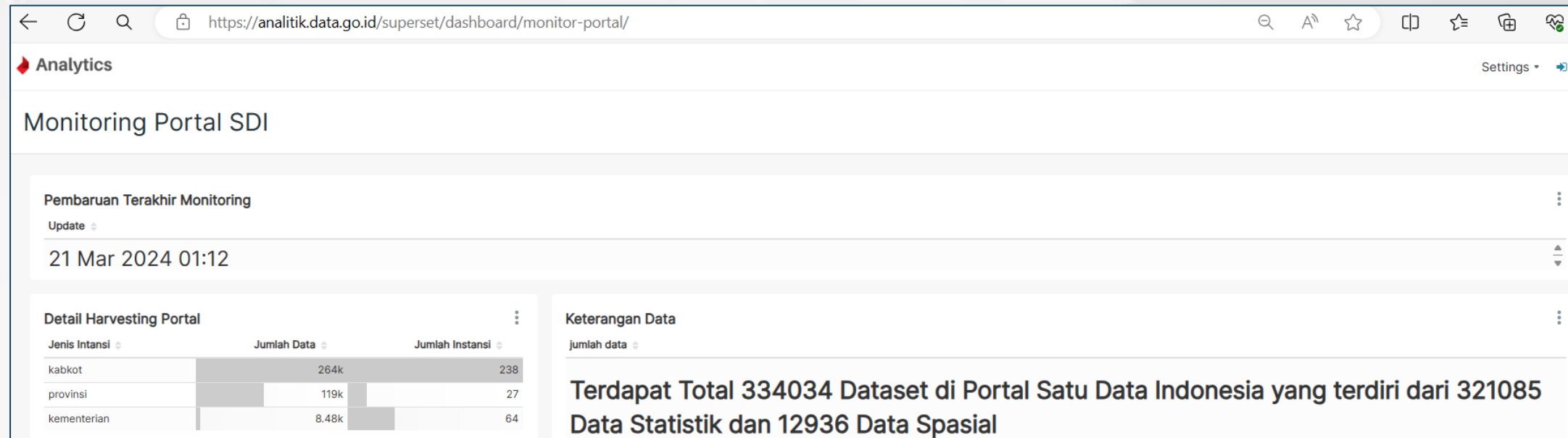
Contoh " Telah Melaksanakan Penyebarluasan Data", diantaranya:

1. Penyebarluasan data telah dilakukan satu pintu oleh walidata
2. Penyebarluasaan data sudah terhubung dengan pusat rujukan informasi statistik, portal SDI, JIGN dan/atau Sistem Big Data Pemerintah
3. Tidak semua data disebarluaskan untuk publik, sehingga ada manajemen akses data

Contoh Bukti Dukung

LEVEL 4

Penyebarluasan Data melalui Portal SDI



<https://analitik.data.go.id/superset/dashboard/monitor-portal/>

50303 Pemanfaatan Big Data

*indikator bersifat umum/*general* (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

Domain	5 : Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	3 : Penguatan SSN Berkelanjutan	50303
Indikator	3 : Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	
Tingkat	Kriteria	
1	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data atau Walidata dalam bentuk kajian dan eksperimen	
3	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan oleh Produsen Data atau Walidata untuk menghasilkan data statistik pendukung	
4	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala bersama Pembina Data Statistik	
5	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Definisi spesifik dari data besar sering kali lebih dari sekadar “data dalam jumlah besar”. Meskipun volume merupakan aspek penting, big data mencakup beberapa karakteristik utama berupa 3Vs (Volume, variety, dan velocity) atau Bahkan 5Vs (Veracity dan Value). UN belum memiliki definisi jelas, namun yang diutamakan adalah aspek “*Real-time monitoring*” dengan “*Volume data besar dengan kecepatan yang tinggi*”

Cakupan Pemenuhan indikator ini antara lain:

- 1. Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data**
- 2. Tersedianya laporan hasil evaluasi (diharapkan juga termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data**

Contoh "Telah Melaksanakan Pemanfaatan Big Data", diantaranya:

1. Memanfaatkan *big data* (*Crowdsourcing, data-streaming, web-scraping*) yang menghasilkan data statistik sebagai data pendukung
2. Memanfaatkan data sensor yang real-time untuk monitoring tugas dan tujuan organisasi

Contoh Bukti Dukung

LEVEL 3 Karena menghasilkan statistik pendukung

Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2022

↪ Bagikan



Nomor Katalog : 8401011

Nomor Publikasi : 06300.2302

ISSN/ISBN : 2085-9309

Tanggal Rilis : 12 Mei 2023

Ukuran File : 16.87 MB

Abstraksi

Publikasi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2022 merupakan publikasi rutin tahunan yang disusun dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan pendataan berbasis Mobile Positioning Data (MPD) dari salah satu operator telepon seluler. Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk, kebangsaan, dan pola kunjungan.

Terima Kasih

